

# **KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DIBAWAH PEMERINTAHAN DONALD TRUMP DALAM MENANGGAPI PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA**

**Oleh : Rahayu Pertiwi**

*rahayupertiwi08@gmail.com*

**Pembimbing : Irwan Iskandar, S.IP, MA**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*This research aims to explain foreign policy of United States under President Donald Trump toward North Korea Nuclear program. The research uses the Perspective of Constructivism that emphasize the intersubjectivity (shared understandings) between states in their relations. The level-analysis of this research is nation-states which find that the foreign policy as manifestation of the national interest of the nation as an international actor. Theory of foreign policy that use in this research notice to explain the foreign policy as the strategy and determination in respond to international environment. This research is also supported by the concept of national identity and interest as the measurements to act or respond which is reflected in foreign policy*

*The method used in this research from the measurement of the data is qualitative research method, and from the way of processing data is descriptive method. Furthermore, the technique of data analysis is based on data from literature studies with the consideration that the data is capable in providing information regarding the problem under research.*

*The results of the research explains that the United States' Foreign Policy under president Trump toward North Korea is based on the Strategic Accountability policy through Maximume Pressure Campaign that exert international community supports, mainly United Nations Security Council.*

***Keyword : Foreign Policy, National Identity, National Interest, Strategic Accountability, Maximume Pressure Campaign, and Nuclear Program.***

## PENDAHULUAN

Penelitian ini akan mengkaji tentang kebijakan Amerika Serikat dibawah pemerintahan Donald Trump dalam menanggapi program nuklir Korea Utara, melalui sudut pandang diplomasi dan pertahanan sebagai fokus studi dari peneliti.

Hubungan internasional bisa saja diwarnai dengan kondisi kooperatif ataupun konfliktual, dikarenakan negaralah yang menjadi penentu realitas hubungan diantara mereka, karena sejatinya hubungan diantara negara-negara merupakan gagasan yang dikonstruksi dari interaksi antara aktor tersebut.<sup>1</sup> Berlandaskan pada asumsi tersebut, penelitian dimulai dengan memahami hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara yang mengarah kearah konfliktual.

Alasan yang paling mendasar sejatinya adalah nilai yang dianut, dimana demokrasi merupakan identitas Amerika Serikat dan nilai dasar bagi politik luar negerinya. Identitas dan nilai-nilai yang dianutnya pun menjadi tolak ukur dalam menilai negara-negara, dan menjalin hubungan dengan negara tersebut. Bagi Amerika Serikat, nilai demokrasi juga menjadi penentu mana kawan dan mana lawan.

Sementara itu, hubungan internasional terutama dalam bidang strategis, telah mengalami perubahan besar sejak 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki.<sup>2</sup> Sejak saat itu banyak negara berlomba-lomba ingin mengembangkan senjata nuklir, baik

karena alasan keamanan maupun untuk meningkatkan pengaruh dalam perpolitikan internasional. Salah satunya Korea Utara, yang sejak akhir 1950an telah terlibat dengan perjanjian kerjasama dengan Uni Soviet, pada program penelitian pengembangan nuklir di Yongbyon. Reaktor 5 MWe inilah yang nantinya menjadi tonggak penting dalam pengembangan program nuklir Korea Utara dan menjadi fasilitas utama dalam pengembangan kemampuan nuklirnya.

Tahun 1985 Korea Utara sempat menjadi bagian dari rezim NPT (*Non-Proliferation Treaty*), namun inspeksi oleh IAEA (*International Atomic Energy Agency*) baru bisa dilakukan pada tahun 1992. Amerika Serikat yang ketika itu, dipimpin oleh Bill Clinton pada Tahun 1994, sempat terlibat dalam persetujuan. Namun, akhirnya Korea Utara bersedia berunding, yang hasilnya sebuah kesepakatan dalam Kerangka Kerja (*Agreement Framework*) tahun 1994 disepakati. Korea Utara bersedia membekukan program nuklirnya dengan imbalan bantuan ekonomi dan diplomatik dari Amerika Serikat.

Kemudian pada awal tahun 2002 Amerika Serikat dibawah George W Bush Jr. memasukkan Korea Utara dalam daftar lingkaran setan (*Axis of Evil*) atau poros kejahatan yang mempersenjatai diri dan mengancam perdamaian dan keamanan dunia. prospek akan resolusi damai ketika itu tampak redup, mengingat kebijakan luar negeri dan pertahanan Amerika Serikat dibawah Bush yang ditandai dengan unilateralisme kekuatan hegemoni, realisme yang ofensif, dan begitu fokus pada isu senjata pemusnah massal dan terorisme.

Korea Utara sendiri pada tahun 2003 awal, justru memutuskan untuk

---

<sup>1</sup> Cynthia Weber, *International Relations Theory : A Critical Introduction*, edisi kedua. (London dan New York : Routledge, 2005), 67.

<sup>2</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Cetakan Revisi. (Jakarta : LP3ES, 1994), 189.

menyatakan menarik diri dari Rezim NPT (*Non-Proliferation Treaty*).<sup>3</sup> Upaya melalui perundingan kembali ditempuh ketika itu, melalui *Six Party Talks* yang tidak hanya melibatkan Amerika Serikat, tetapi juga Jepang, Cina, Rusia, Korea Selatan dan Korea Utara itu sendiri.

Akhirnya, pada Juli 2006, Korea Utara menembakkan tujuh rudal dan melakukan uji coba senjata nuklir bawah tanah pertamanya pada 9 Oktober tahun 2006. Tahun-tahun berikutnya, upaya dilakukan melalui perundingan Enam pihak dengan perjanjian penghentian produksi Plutonium di kompleks nuklir Yongbyon, namun tetap saja belum mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pihak.

Program nuklir Korea Utara masih tetap berlanjut. Amerika Serikat selama masa pemerintahan Obama, menanggapi melalui kebijakan *strategic patience*, namun tidak berhasil menghentikan atau setidaknya mengurangi upaya Korea Utara dalam pencapaian program nuklirnya. Perubahan pemimpin juga berpengaruh tindakan dan prioritas keamanan.<sup>4</sup> Namun, tidak serta merta mengubah pola kebijakan Amerika Serikat.

Tahun 2017, kepemimpinan Amerika Serikat beralih ke Donald Trump, dan seiring dengan semakin agresifnya Korea Utara mengembangkan program nuklir dan berbagai uji coba yang dilakukannya.

---

<sup>3</sup> Official Statement of The Government of The DPR of Korea “Withdraw of the Nuclear Non Proliferation Treaty”. 10 (Januari 2003), <http://www.korea-dpr.info/lib/203.pdf> (diakses 29 September 2018).

<sup>4</sup> Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Cetakan 1. (Yogyakarta : CAPS Publishing, 2011), 254.

Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump, melalui kebijakan luar negeri *America First* dalam pilar-pilar strategi keamanan nasionalnya, menempatkan nuklir Korea Utara menjadi salah satu prioritas utama kebijakannya terkait keamanan.

Pilar I Strategi Keamanan nasional Amerika Serikat (*Protect the American People, The Homeland and American Way of Life*) poin *Secure U.S Borders and Territory* yang melingkup di dalamnya *Defend against Weapons of Mass Destruction (WMD)*.<sup>5</sup> Kepentingan yang dijelaskan melalui pilar ini menjadi dasar bagi kebijakan Amerika Serikat dalam menanggapi program nuklir Korea Utara.

Jelas bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan sedikitpun kesempatan kepemilikan nuklir bagi Korea Utara dan rezimnya di panggung internasional dan akan terus membuat perhitungan dengan perilaku nekat dan mengancam tersebut dengan meminta setiap negara di Dewan Keamanan PBB untuk terus bergabung bersama mengerahkan semua kemampuan dalam menanggapi program nuklir Korea Utara.

Untuk menganalisa kebijakan Amerika Serikat dalam menanggapi program nuklir Korea Utara, peneliti membangun penelitian ini atas dasar perspektif konstruktivisme melalui dua konsep utamanya yaitu identitas dan kepentingan nasional, kemudian menggunakan tingkat analisa negara-bangsa dan teori kebijakan luar negeri.

Perspektif konstruktivisme memandang bahwa politik internasional sejatinya terbentuk dari proses interaksi

---

<sup>5</sup> Dokumen “National Security Strategy of the United States of America”, *White House*, (Desember 2017).

antara aktor. Konstruktivisme juga menekankan bahwa struktur hubungan internasional dibentuk oleh kondisi sosial, dan struktur tersebutlah yang nantinya akan membentuk identitas dan kepentingan aktor tersebut kemudian menjadi dasar suatu tindakan.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, dalam melihat kondisi anarki internasional, anarki dilihat sebagai apa yang dibuat negara darinya atau *what states make of it*. Konstruktivisme melihat bahwa negara-negara membangun satu sama lain dalam hubungan mereka, dan dengan demikian mereka juga membangun anarki internasional yang menegaskan hubungan diantara mereka. Hal ini menyebabkan suatu cara bertindak mereka dalam menghadapi apa yang mereka anggap teman atau musuh.<sup>7</sup>

Menurut konstruktivisme, aktor yang utama atau dominan dalam sistem internasional adalah negara. Tindakan atau perilaku negara didorong oleh intersubjektifitas atau penafsiran aktor satu terhadap aktor lainnya. Konstruktivisme juga menekankan pada intersubjektifitas atau (*shared understandings*) antar negara. Intersubjektifitas tersebut memberikan pemaknaan terhadap siapa aku/kami dan siapa kamu/ mereka. Setiap bentuk tindakan ataupun kebijakan suatu negara baik konfliktual maupun kerjasama, semuanya didasari atas

*meanings* yang muncul dari negara dan lingkungan internasionalnya.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, dalam menganalisa kebijakan luar negeri, konstruktivisme memandang bahwa interaksi antar aktor tidak selalu didominasi oleh kompetisi kepentingan material, tetapi lebih kompleks melibatkan ide, nilai dan juga institusi. Konstruktivisme menjelaskan bagaimana aspek non-material yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, dimana aktor-aktor internasional bertindak berdasarkan identifikasi mereka terhadap eksistensi aktor lain.<sup>9</sup>

Perspektif konstruktivisme dalam penelitian ini didukung oleh dua konsep utama yang dapat digunakan dalam menganalisa kebijakan yaitu konsep identitas dan kepentingan. Identitas dimaknai sebagai sebuah kualitas subjektif atau level-unit yang berakar dari *self-understanding* suatu aktor. Identitas menjadi dasar dari kepentingan negara yang bersangkutan, dengan kata lain pemaknaan tentang siapa kami dan siapa mereka akan menentukan konsepsi tentang apa kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai, dimana kepentingan tersebut pada gilirannya akan menentukan tindakan apa yang akan diambil negara tersebut. Oleh karena itu, identitas diperlakukan sebagai variabel independen yang menjelaskan perilaku negara.

Kepentingan nasional dimaknai sebagai apa yang terbaik bagi

---

<sup>6</sup> Maysam Behraves, "Constructivism : An Introduction". *Lund University*. (Januari 2011), <http://www.e-ir.info/2011/02/03/constructivism-an-introduction/> (diakses 09 Oktober 2018)

<sup>7</sup> Alexander Wendt, "Anarchy is What States Make of it : The Social Construction of Power Politics." Dalam *International Organization* Vol. 46 No. 2 (1992) Cambridge University Press : 396-397.

---

<sup>8</sup> Aprilia Restuning Tunggal, *Ilmu Hubungan Internasional : Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Isu Global Kontemporer*, Cetakan 1. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 93-94.

<sup>9</sup> I Gede Wicaksana, "Konstruktivisme", *Teori Hubungan Internasional : Perspektif Klasik*, editor Vinsensio Dugis, (Surabaya : Cakra Studi Global Strategis (CSGS), 2016), 160-161.

masyarakat nasional, atau dengan membatasi maknanya sebagai apa yang terbaik bagi suatu negara dalam urusan luar negerinya. Melalui perspektif konstruktivisme, peneliti memandang bahwa kebijakan Amerika Serikat dalam menanggapi program nuklir Korea Utara berasal dari pemahaman terhadap identitas ataupun nilai-nilai yang ada pada dirinya, yang kemudian menentukan kepentingan yang akan diperjuangkan dan sekaligus membentuk persepsi Amerika Serikat terhadap Korea Utara sebagai ancaman bagi kepentingannya.

Tingkat analisa negara-bangsa melihat bahwa hubungan internasional pada dasarnya di dominasi oleh perilaku negara-bangsa atau dengan kata lain, kita harus mempelajari proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri oleh suatu negara-bangsa sebagai suatu unit yang utuh.<sup>10</sup> Selain itu, unit analisa negara-bangsa mampu menjelaskan perilaku suatu negara dalam hubungan internasional yang dipengaruhi oleh karakteristik negara itu sendiri, perbedaan-perbedaan diantara berbagai negara, dan juga dengan pengaruh negara terhadap sistem internasional.

Berdasarkan tingkat analisa negara-bangsa, dalam menganalisa kebijakan suatu negara, kita haruslah memperhatikan karakteristik negara, misalnya ideologi dan nilai-nilai yang dianut dan sistem politik dari negara tersebut.<sup>11</sup> Melalui tingkat analisa negara-bangsa, peneliti melihat perbedaan perilaku dan kebijakan antar negara disebabkan oleh faktor

karakteristik yang berbeda. Misalnya karena perbedaan ideologi, proses pembuatan kebijakan, dinamika sistem politik dan sebagainya.

Akhirnya, tingkat analisa negara-bangsa melihat bahwa perang, permusuhan, kerjasama, dan tindakan diplomatik lainnya yang terjadi di antara negara, sebagai akibat dari tekanan politik, ideologi, dan kebutuhan dalam negeri lainnya. Melalui tingkat analisa negara-bangsa, perilaku atau kebijakan negara dilihat sebagai perwujudan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut oleh negara tersebut.

Kebijakan luar negeri menurut James N. Rosenau merupakan serangkaian atau sekumpulan komitmen yang mengacu pada strategi dan keputusan yang memuat tujuan-tujuan khusus serta sarana-sarana untuk pencapaiannya.<sup>12</sup> Semua negara dipandang sebagai suatu entitas yang selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya, dengan berpijak pada penilaian akan kapabilitas yang dimilikinya.

Rosenau membagi 3 konsepsi utama kebijakan luar negeri, yang perlu dipahami untuk dapat menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara. Yaitu *pertama*, kebijakan luar negeri sebagai seperangkat orientasi, dimana kebijakan luar negeri mengacu pada sikap, persepsi, dan nilai-nilai, yang semuanya ini berasal dari pengalaman historis dan situasi strategis negara yang menandai tempatnya di dunia politik atau posisinya dalam politik internasional. *Kedua*, kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan komitmen dan rencana tindakan, dimana kebijakan luar negeri dipandang sebagai strategi,

---

<sup>10</sup> K.J Holsti, "International Politics : A framework for Analysis" *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis*, Penerjemah M. Tahir Azhary (Jakarta: Erlangga, 1988), 16.

<sup>11</sup> Mas'ood, 44-45.

---

<sup>12</sup> Teuku May Rudy, *Teori Etika dan Kebijakan dalam Hubungan Internasional* (Bandung : Angkasa, 1993), 16.

keputusan nyata, dan kebijakan yang dapat diobservasi, yang diambil ketika negara-negara terkait dengan situasi lingkungan eksternalnya. *Ketiga*, kebijakan luar negeri sebagai suatu bentuk perilaku, kebijakan luar negeri mengacu pada fase empiris yang melibatkan langkah-langkah konkret atau kegiatan itu mengikuti pemahaman terhadap orientasi dari kebijakan luar negeri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kapabilitas Program Nuklir Korea Utara

Sejak tahun 2012, dibawah kekuasaan Kim Jong Un, Korea Utara mengadopsi kebijakan *Byungjin*, yang merupakan pembangunan sejalan antara ekonomi dan senjata nuklir. Lebih lanjut, Korea Utara secara selektif lebih transparan tentang program nuklirnya, terus melakukan uji coba rudal dan nuklir, parade militer, dan rilis media untuk menunjukkan kredibilitas klaim tentang kemampuan nuklir yang dimilikinya.<sup>13</sup>

Reaktor 5 MWe di kompleks nuklir Yongbyon telah mulai beroperasi sejak tahun 1986, juga telah menjadi pusat upaya plutonium Korea Utara. Pada tahun 2016, reaktor 5 MWe diperkirakan mampu menghasilkan hingga 6 kg plutonium per tahun. Citra satelit pada April 2016, Januari 2017, dan April 2018 mengkonfirmasi peningkatan aktivitas di situs pemrosesan ulang. Total estimasi persediaan plutonium yang dimiliki Korea Utara dalam kisaran 20-40 kg,

---

<sup>13</sup> Daniel Wertz, dkk, "Issue Brief : North Korea's Nuclear Weapons Program", *National Committee on North Korea*, (April 2018), <https://www.ncnk.org/resources/publications/DPRK-Nuclear-Weapons-Issue-Brief.pdf> (diakses 01 Oktober 2018).

karena fakta bahwa plutonium telah digunakan dalam beberapa tes yang dilakukan pada 2016 dan 2017.

Terkait pengayaan uranium, laporan tahun 2017 oleh *Institute for Science and International Security* memperkirakan produksi HEU di Yongbyon antara 38-93 kg per tahun dengan perkiraan median 58 kg, dan menilai cadangan yang dihasilkan oleh fasilitas ini sekitar 115-276 kg dengan median 175 kg uranium tingkat-senjata (*Weapons-Grade Uranium*). Hingga Januari 2018, Korea Utara diperkirakan memiliki 250-500 kg uranium.<sup>14</sup>

Korea Utara berkomitmen untuk mengembangkan rudal bersenjata jarak jauh yang mampu menimbulkan ancaman langsung terhadap Amerika Serikat, dimana tahun 2017 menunjukkan suatu perkembangan yang signifikan dalam program nuklir Korea Utara, salah satunya ditunjukkan dengan keberhasilan Korea Utara menguji Hwasong-14 dan Hwasong-15, yang merupakan ICBM pertama Korea Utara.<sup>15</sup>

Berdasarkan data hingga Juni 2018, rudal-rudal Korea Utara terdiri atas SRBMs (*Short-Range Ballistic Missiles*), MRMs (*Medium-Range Ballistic Missiles*), IRBMs (*Intermediate-Range Ballistic Missiles*), ICBMs (*Inter-Continental Ballistic Missiles*), SLV (*Satellite Launch Vehicles*) dan sedang mengembangkan

---

<sup>14</sup> Arms Control, "Fact sheet and Brief : Arms Control and Proliferation Profile : North Korea". (June, 2018), <https://www.armscontrol.org/factsheets/northkoreaprofile> (Diakses pada 26 Januari 2018).

<sup>15</sup> Nuclear Threat Initiative, "North Korea Nuclear Technology & Nuclear Weapons Program." (2018). <https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear/> (diakses 16 Februari 2019)

*SLBMs (Submarines-Launched Ballistic Missiles).*<sup>16</sup>

Tabel 1 Kemampuan Rudal Korea Utara

Missile	Class	Range
Hwasong-15	ICBM	8.500-13.000 km
Hwasong-14	ICBM	10.400 km
Hwasong 12/ KN-17	IRBM	4.500 km
Kwangmyongsong/ Unha-3 mod: 2, Taepodong-3	SLV	12.000+ km
Unha 3/ Taepodong-3	SLV	10.000+ km
Taepodong 2/ Unha-2, Paektusan-2, Moksong-2	SLV	6.000-9.000 km
Taepodong1/ Paektusan, Moksong	IRBM	2.000-5.000 km
KN-14	ICBM	8.000-10.000 km
KN-08 (Hwasong-13)	ICBM	11.500 KM
Hwasong-10/ Musudan	IRBM	2.500-4.000 km
Nodong/ Rodong	MRBM	1.300-1.500 km
KN-18/ MaRV Scud Variant	SRBM	500 km
KN-02/ SS-21 Scarab, 9K79 Tochka	SRBM	250-500 km
KN-11/ Bukgeukseong-1, Polaris-1	SLBM	1.000+ km
KN-15/ Pukso Dong-2	MRBM	1.200-2.000 km
KN-06	SAM	150 km
KN-09	MLRS	190 km
Scud-ER	SRBM	800-1.000 km
Hwasong-6	SRBM	500 km
Hwasong-5	SRBM	300 km
KN-02	SRBM	120-170 km

Sumber : Olahan Pribadi, diolah dari NTI (*Nuclear Threat Initiative*) dan CSIS (*Center for Strategic and International Studies*).

<sup>16</sup> US Defense Intelligence Agency, "Global Nuclear Landscape 2018", *Defense Intelligence Agency*, (Februari 2018), 19.

Tabel 2 Uji Coba Rudal dan Nuklir Korea Utara Tahun 2017

Tanggal Peluncuran	Tipe Rudal	Peluncuran
28 November 2017	Hwasong-15 (ICBM)	1
14 September 2017	Hwasong-12 (IRBM)	1
2 September 2017	Uji Coba Nuklir	100-140 yield
28 Agustus 2017	Hwasong-12 (IRBM)	1
25 Agustus 2017	KN-21 Scud Variant (SRBM)	3
28 Juli 2017	Hwasong-14 (ICBM)	1
4 Juli 2017	Hwasong-14	1
4 Juli 2017	Hwasong-14	1
7 Juni 2017	Kumsong-3 (ASCM)	4
28 Mei 2017	KN-18 MaRV Scud-Variant (SRBM)	1
21 Mei 2017	KN-15 (MRBM)	1
14 Mei 2017	Hwasong-12 (IRBM)	1
28 April 2017	Hwasong-12 (IRBM)	1
16 April 2017	Hwasong-12 (IRBM)	1
4 April 2017	Hwasong-12 (IRBM)	1
21 Maret 2017	Unknown	1
5 Maret 2017	Scud-ER (MRBM)	4
11 Februari 2017	KN-15 (Pukkuksong-2)/Polaris-2 (MRBM)	1

Sumber : Olahan Pribadi, diolah dari CSIS (*Center for Strategic and International Studies*) melalui <https://missilethreat.csis.org/country/dprk/>, dan NTI (*Nuclear Threat Initiative*) "CNS North Korea Missile Database".

### Identitas dan Kepentingan Nasional Amerika Serikat

Identitas nasional Amerika Serikat terdiri atas nilai-nilai fundamental yang tercermin dalam berbagai dokumen negara, yaitu konstitusi maupun dalam cara hidup Amerika Serikat dan pergaulannya dalam dunia internasional. Identitas yang dipahami Amerika Serikat sejatinya berasal dari sejarah Amerika Serikat yang mencerminkan siapa

Amerika Serikat itu atau pemahaman Amerika Serikat terhadap dirinya.

Berdasarkan sejarah, Amerika Serikat lahir dari sebuah keinginan besar akan kehidupan, kebebasan dan pencapaian kebahagiaan. Karena alasan inilah, para *Founding Fathers* Amerika Serikat menyusun dan mengesahkan Konstitusi yang menjadikan bentuk pemerintahan seperti yang berlaku saat ini, yaitu demokrasi.

Nasionalisme Amerika Serikat, berasal dari ide "*A City upon a Hill*" sebagaimana diungkapkan oleh John Winthrop tahun 1630, "*The eyes of all people are upon us.*" Winthrop merangkum apa yang kemudian disebut dengan "*exceptionalism*" yang menurutnya Amerika Serikat adalah model bagi dunia dan ada untuk membebaskan umat manusia.

Keyakinan tersebut memberikan inspirasi bagi bangsa Amerika dalam menjalankan hubungan internasional, bahwa bangsa Amerika sangat yakin sebagai bangsa yang mampu menyelesaikan berbagai masalah. Pemerintah Amerika Serikat merasa memiliki tanggung jawab khusus untuk memaksakan atau menggunakan kekuatannya demi kebaikan dunia, dan sekaligus menjadi model demokrasi bagi negara-negara lain dan menawarkan bantuan kemanusiaan dan militer disaat dibutuhkan.

Dibawah pemerintah Donald Trump, baginya negara menjadi "*exceptional*" hanya dengan menjadi lebih kaya dan kuat, singkatnya dengan menang dalam segala hal dan menjadi contoh bagi negara lain, yang dijelaskan dalam sebuah kalimat "*Winning Again... Shine as an example for everyone to follow*". Ketika pidato pelantikannya, Trump menekankan semangatnya terhadap Amerika Serikat "*America will start winning again... We*

*will follow two simple rules : buy American and hire American*".<sup>17</sup>

Lebih lanjut, kepentingan nasional digunakan untuk menggambarkan alasan, motivasi atau justifikasi utama yang mendasari perilaku atau tindakan suatu negara dalam lingkungan internasional. Kepentingan nasional sejatinya merupakan cerminan dari identitas yang dipahami oleh suatu negara, dalam hal ini Amerika Serikat.

Amerika Serikat dibawah pemerintahan Donald Trump, secara jelas memaparkan kepentingan nasional melalui kebijakan luar negeri yang dijalankannya. Amerika Serikat berkomitmen akan tetap akan menjadi pemimpin dunia, sekaligus memberi dorongan kepada negara-negara lain untuk turut ambil bagian dalam politik internasional sesuai dengan kemampuannya masing-masing. "*As long as I am President, the servicemen and women who defend our Nation will have the equipment, the resources, and the funding they need to secure our homeland, to respond to our enemies quickly and decisively, and, when necessary, to fight, to overpower, and to always, always, always win.*"<sup>18</sup>

Melalui strategi keamanan nasional Amerika Serikat, dijelaskan bahwa kepentingan nasional vital Amerika Serikat, secara garis besar digambarkan melalui 4 pilar utama, yaitu : 1). *Protect the homeland, the American people, and American way of life* (Melindungi tanah air, warga

---

<sup>17</sup> White House, "Remarks Of President Donald J. Trump – As Prepared For Delivery Inaugural Address" *The Inaugural Address*, 20 (Januari 2017) <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/> (diakses pada 14 Januari 2018).

<sup>18</sup> White House, Dokumen National Security Strategy.

Amerika, dan pandangan hidup Amerika), 2). *Promote American prosperity* (Meningkatkan kesejahteraan Rakyat Amerika) 3). *Preserve peace through strength* (Memelihara perdamaian melalui kekuatan), dan 4). *Advance America influence* (Meningkatkan pengaruh Amerika).

Melalui Pilar I Kepentingan nasional vital Amerika, disebutkan secara jelas, bahwa perlawanan terhadap senjata pemusnah massal tersebut diidentifikasi sebagai perlawanan terhadap upaya Korea Utara atas kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir. Lebih lanjut, Amerika Serikat menegaskan bahwa sumber masalah bukanlah dengan warga Korea Utara, tetapi dengan rezim dan program nuklirnya, dan bagi Amerika Serikat ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam menanggapi Korea Utara dengan rezimnya.

### **Kebijakan *Strategic Accountability* Amerika Serikat dalam Menanggapi Program Nuklir Korea Utara.**

Kebijakan luar negeri *America First* dibawah pemerintahan Donald Trump didefenisikan sebagai kebijakan Amerika yang menjadikan rakyat, nilai-nilai, perhatian dan kepentingannya sebagai prioritas utama dan pertama dan Amerika akan tetap menjadi pemimpin internasional. *America First* bukan berarti Amerika sendiri, tetapi semua negara harus memberikan kontribusinya dalam komunitas internasional, terutama dalam melawan ancaman internasional.

Secara garis besar, dalam buku strategi pertahanan nasional Amerika Serikat tahun 2017, disebutkan bahwa tujuan utama strategi pertahanan nasional Amerika Serikat adalah untuk membuat *America great again*, yang diyakini dengan cara menempatkan keamanan dan kepentingan nasional

sebagai prioritas utama. Salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri tersebut adalah program nuklir Korea Utara.

Kebijakan Amerika Serikat dalam menanggapi program nuklir Korea Utara dibawah pemerintahan Donald Trump yaitu *Strategic Accountability*, yang didefenisikan sebagai strategi untuk meminta dan mendesak pertanggungjawaban Korea Utara terhadap tindakannya dalam hal pengembangan program nuklir. Kebijakan ini juga menyerukan kepada dunia internasional untuk meningkatkan tekad dan komitmen dalam meminta pertanggungjawaban Korea Utara, dan meminta negara-negara untuk turut bertanggung jawab atas komitmen mereka dalam melakukan isolasi dan menegakkan sanksi yang telah ditetapkan secara ketat melalui Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, kebijakan *strategic accountability* Amerika Serikat dijalankan dengan melakukan *maximume pressure campaign* yaitu melakukan kampanye penekanan secara maksimum terhadap Korea Utara, dimana dalam melakukan kampanye penekanan tersebut, Amerika Serikat mencari dukungan internasional melalui forum-forum internasional.

### **1. Amerika Serikat Mendorong Ditetapkannya Sanksi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB.**

Amerika Serikat memprakarsai dan mendorong dibuat dan dikeluarkannya resolusi-resolusi yang berupa sanksi multilateral yang berat

---

<sup>19</sup> Mattis dan Tillerson (Secretary of Defense dan Secretary of State) "We are Holding Pyongyang to Account". *White House*. 14 Agustus 2017. Di akses melalui <http://www.whitehouse.gov/briefings-statements/mattis-tillerson-holding-pyongyang-account/> pada 27 September 2018.

melalui Dewan Keamanan PBB, dimana Amerika Serikat berulang kali mengajukan rancangan/ *draft* resolusi yang kemudian diadopsi menjadi resolusi.

Pada 23 Maret 2017, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2345, resolusi tersebut tidak berupa sanksi, namun sebuah resolusi untuk memperbaharui mandat panel ahli selama 13 bulan kedepan untuk membantu komite sanksi 1718 terhadap Korea Utara, setelah Korea Utara meluncurkan rudal balistiknya pada 21 Maret 2017.

Namun, Korea Utara tetap masih bersikap sama dengan melakukan kembali peluncuran rudal balistik pada 15 April 2017, dan Dewan menyatakan niatnya untuk mempertimbangkan pemberian sanksi tambahan. Akhirnya pada 28 April atas prakarsa Amerika Serikat, Dewan mengadakan pertemuan tingkat Menteri tentang denuklirisasi Korea Utara (S/PV.7932), dimana sebelum pertemuan diadakan, Amerika Serikat terlebih dahulu menyebarkan Nota konsep yang isinya mengundang anggota Dewan Keamanan untuk membahas bagaimana cara untuk memaksimalkan dampak dari tindakan atau sanksi yang telah diberikan, dan menunjukkan tekad dengan menanggapi provokasi Korea Utara dengan langkah-langkah yang signifikan.

Pada 2 Juni 2017, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi Resolusi 2356, resolusi tersebut atas rancangan yang diserahkan oleh Amerika Serikat sebelumnya, yang berarti memperluas lingkup sanksi yang ditetapkan terhadap Korea Utara. Resolusi tersebut juga menambahkan 14 orang dan 4 entitas ke dalam daftar sanksi yang ditargetkan dibawah komite sanksi 1718. Secara khusus, langkah-langkah tersebut mengamanatkan kepada semua negara anggota untuk

segera membekukan dana, aset, dan sumber daya ekonomi di wilayah masing-masing, yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang ataupun entitas yang tercantum dalam lampiran I dan II resolusi tersebut.

Pada Agustus 2017, Dewan Keamanan PBB kembali mengadopsi resolusi 2371 dengan suara bulat, mengancam peluncuran rudal balistik Korea Utara pada 3 dan 28 Juli 2017. Resolusi tersebut secara signifikan memperkuat sanksi terhadap Korea Utara, dimana resolusi tersebut memberlakukan larangan total terhadap ekspor batubara (sumber pendapatan eksternal terbesar Korea Utara), besi, bijih besi, timah, bijih timah, dan makanan laut dari Korea Utara.<sup>20</sup>

Melalui dokumen S/2017/769 Amerika Serikat mengajukan rancangan/ *draft* resolusi penetapan sanksi terhadap Korea Utara, voting terhadap *draft* tersebut diadakan pada sidang ke 8042 pada 11 September 2017, dan dengan suara bulat *draft* tersebut diadopsi melalui resolusi 2375 sebagai tanggapan atas uji coba nuklir keenam yang dilakukan Korea Utara pada 2 September 2017.<sup>21</sup> Dikeluarkannya resolusi tersebut, semakin memperluas sanksi ke sektor tambahan ekonomi Korea Utara.

Pada 22 Desember 2017, sidang ke 8151 Dewan Keamanan PBB, setelah melakukan voting terhadap rancangan resolusi, yang kemudian diadopsi menjadi resolusi 2397. Resolusi 2397

---

<sup>20</sup> "Fact Sheet : Resolution 2371 (2017) Strengthening Sanction on North Korea", *United States Missions to the United States*, <https://usun.state.gov/remarks/7924> (5 August, 2017), (diakses pada 5 Maret 2019).

<sup>21</sup> Dokumen Security Council, S/PV.8042, "8042<sup>nd</sup> Meeting", *United Nations*, (11 September 2017), <https://undocs.org/en/S/PV.8042> (diakses pada 6 Maret 2019).

dibangun atas dasar resolusi 2375 (2017), sehingga resolusi tersebut menjatuhkan sanksi yang lebih kuat dari resolusi sebelumnya pada sektor energi, ekspor, dan impor Korea Utara serta otoritas maritim baru untuk membantu menanggulangi kegiatan penyelundupan ilegal Korea Utara.

Pada Maret 2018, Amerika Serikat kembali mengajukan *draft* resolusi ke Dewan Keamanan PBB dan dilakukan voting melalui sidang Dewan keamanan ke 8210 pada 21 Maret 2018. Voting Dewan Keamanan tersebut berakhir dengan suara bulat menyetujui adopsi *draft* atau rancangan resolusi menjadi resolusi 2407.<sup>22</sup> Resolusi tersebut bukan berupa sebuah sanksi tambahan, melainkan memperpanjang mandat Dewan Keamanan kepada Komite Sanksi 1718 terhadap Korea Utara hingga 24 April 2019, dan meminta Komite sanksi melakukan pengawasan terhadap implementasi atas resolusi 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), dan 2397 (2017).<sup>23</sup>

## **2. Menekan Cina dan Rusia dalam penerapan Sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara**

Penting bagi Amerika Serikat untuk menekan Cina dan Rusia mengingat hubungan kedua negara tersebut dengan Korea Utara. Melalui Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat berupaya menekan Cina dan Rusia untuk menerapkan sanksi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB secara penuh. Pada sidang ke-7996 Dewan

Keamanan 5 Juli 2017, Amerika Serikat mengingatkan bahwa tindakan nyata untuk penegakan sanksi harus diambil dengan bekerjasama, dan menekankan bahwa sebagian besar penegakan sanksi Dewan Keamanan PBB berada di tangan Cina, karena 90% perdagangan Korea Utara adalah berasal dari Cina.

Pada sidang Dewan Keamanan ke 8137, 15 Desember 2017, melalui menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex W Tillerson secara khusus meminta Cina dan Rusia untuk melakukan tekanan, Amerika Serikat mempertanyakan tindakan Rusia yang masih saja memperkerjakan pekerja dari Korea Utara yang sebagai gantinya upah tersebut digunakan untuk mendanai program nuklir Korea Utara. Dan juga Cina yang masih saja memasok minyak mentah ke Korea Utara, Amerika Serikat sangat mempertanyakan komitmen keduanya dalam menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara sementara membirkan rakyatnya sendiri dalam kondisi kemiskinan.<sup>24</sup>

Pada sidang Dewan Keamanan PBB ke 8353, 17 September 2018 Amerika Serikat melalui Duta Besarnya untuk PBB menyatakan bahwa Rusia meminta melakukan pertemuan ini dengan tujuan untuk mengkritik Amerika Serikat yang menghalangi proyek Kerata Api yang ingin dicapainya bersama dengan Korea Utara. Rusia juga telah merencanakan untuk meminta Dewan keamanan PBB untuk memulai mengurangi sanksi terhadap Korea Utara. Amerika Serikat melanjutkan bahwa satu-satunya alasan adalah Rusia telah mencurangi

---

<sup>22</sup> Dokumen Security Council, “8210<sup>th</sup> meeting”, New York, *United Nations*, (21 Maret 2018), <https://undocs.org/en/S/PV.8210> (diakses 6 Maret 2019)

<sup>23</sup> Dokumen Resolution 2407 (2018), *United Nations Security Council*, (21 Maret 2018), <http://unscr.com/en/resolutions/doc/2407> (diakses pada 26 oktober 2018)

---

<sup>24</sup> Dokumen Security Council S/PV.8137, “8137<sup>th</sup> Meeting”, *United Nations*, (15 Desember 2017), <https://undocs.org/en/S/PV.8137> (diakses pada 28 Oktober 2018).

pemberlakuan sanksi terhadap Korea Utara.<sup>25</sup>

### **3. Menyerukan kepada Negara-negara untuk Memutuskan Hubungan Dagang dengan Korea Utara dan mematuhi penerapan sanksi.**

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ketika itu, Tillerson pada sidang Dewan Keamanan ke 8137, 15 Desember 2017, menyatakan bahwa banyak sekutu dan mitra Amerika Serikat telah bergabung bersama Amerika Serikat melakukan kampanye penekanan terhadap Korea Utara, yang bahkan melampaui tanggung jawab hanya sekedar kepatuhan akan resolusi Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat juga meminta kepada negara-negara untuk terus meningkatkan tekanan-tekanan melalui aksi unilateral. Sehingga hal tersebut dapat mengisolasi Korea Utara secara politis maupun ekonomis, dan juga memotong dukungan dan dana bagi pengembangan program nuklirnya.

Masih banyak negara yang terus mendanai program nuklir Korea Utara dan terus melanggar penerapan sanksi Dewan Keamanan dan merusak upaya bersama. Untuk itu, Amerika Serikat terus menghimbau dan menekankan kepada semua negara di dunia untuk menghentikan kerjasama dengan Korea Utara dan mengimplementasikan seluruh sanksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Dokumen Security Council S/PV.8353, "8353th meeting", *United Nations*, (17 September 2018), <https://undocs.org/en/S/PV.8353> (diakses pada 6 Maret 2019)

<sup>26</sup> Dokumen Security Council S.PV/8118, "8118<sup>th</sup> meeting", *United Nations*, (29 November 2017), <https://undocs.org/en/S/PV.8118> (diakses pada 5 Maret 2019).

Pada sidang Dewan Keamanan PBB ke 8363, Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat ini, menyatakan bahwa kampanye penekanan maksimum yang dilakukan sejak awal kepemimpinan presiden Trump sejauh ini telah membawa hingga pada perkembangan signifikan dalam sejarah diplomatik, dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, pada 12 Juni 2018. Tetapi, kembali pada sidang tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo mengingatkan bahwa Dewan Keamanan dan semua anggota PBB tidak boleh lupa bahwa yang membawa itu semua adalah kampanye penekanan maksimum yang telah didukung oleh Dewan Keamanan dengan menerapkan sanksi-sanksi berat terhadap Korea Utara. Sehingga, Amerika Serikat menekankan bahwa sampai tujuan akhir denuklirisasi tercapai maka kampanye penekanan tetap harus dilanjutkan, seiring dengan kemajuan diplomatik.<sup>27</sup>

### **4. Menyerukan kepada Negara-negara untuk Memutuskan Hubungan Dagang dengan Korea Utara dan mematuhi penerapan sanksi.**

Sejatinya peraturan domestik yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat bukanlah sebuah sanksi baru terhadap tindakan provokatif Korea Utara dalam pengembangan program nuklirnya, namun merupakan sebuah pedoman dan pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi terhadap Korea Utara agar sanksi yang telah ditetapkan efektif

---

<sup>27</sup> Dokumen Security Council S/PV.8363, "8363th Meeting", *United Nations*, (27 September 2018), <https://undocs.org/en/S/PV.8363> (diakses pada 8 Maret 2019)

dan terhindar dari praktek kecurangan. Sehingga Amerika Serikat dan warga negaranya maupun negara-negara diseluruh dunia diharapkan memiliki pandangan mengenai penerapan sanksi tersebut, yang dengan begitu negara-negara di dunia diharapkan untuk mempertimbangkan dan menyelaraskan pengaturan sanksi domestik masing-masing dengan pedoman dan panduan yang telah dibuat oleh Amerika Serikat.

1. *Title III : Countering America's Adversaries Through Sanction Act.*

Pada tanggal 2 Agustus 2017, Presiden Amerika Serikat menandatangani undang-undang "*Countering America's adversaries Through Sanction Act*" (peraturan Publik 155-44) (CAATSA) atau sebuah pengaturan yang berisi perlawanan terhadap musuh Amerika Serikat melalui suatu tindakan sanksi, salah satunya Korea Utara (*Title III*), yang isinya memberikan sinyal kuat bahwa Amerika Serikat mengawasi setiap pergerakan Korea Utara, bahkan melalui peraturan nasional Amerika Serikat.

2. *Executive Order No. 13810 (Imposing Additional Sanction With Respect to North Korea)*

*Executive order* No. 13810 dikeluarkan pada 20 September 2017, atas dasar otoritas Presiden Amerika Serikat, yang menemukan bahwa tindakan dan kebijakan provokatif, destabilisasi dan represif dari pemerintah Korea Utara, termasuk di dalamnya peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) pada 3 dan 28 Juli 2017, dan uji coba nuklir pada 2 September 2017, merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, ekonomi, dan hubungan internasional Amerika Serikat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Dokumen Executive Order 13810 "Imposing Additional Sanction with Respect to

3. *North Korea Sanction Advisory (Sanction Risk Related to North Korea's Shipping Practices).*

Badan Pengendalian Aset Asing atau *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri dan Penjaga Pantai Amerika Serikat mengeluarkan *Advisory* untuk memperingatkan masyarakat secara global akan praktik pengiriman secara illegal yang digunakan oleh Korea Utara untuk menghindari sanksi yang telah diterapkan. Praktik-praktik ini dapat menimbulkan resiko sanksi yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri pelayaran, termasuk perusahaan asuransi, registrasi bendera, perusahaan pelayaran dan lembaga keuangan. Sehingga pihak-pihak yang dikenai oleh sanksi Amerika Serikat dan/ atau PBB harus mengetahui praktik-praktik ini untuk menerapkan kontrol yang tepat untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan hukum mereka, *advisory* tersebut dikeluarkan pada 23 Februari 2018.<sup>29</sup>

4. *North Korea Sanction and Actions Advisory (Risk with Supply Chain Links to North Korea)*

Departemen Luar Negeri bersama dengan Departemen Keamanan dalam Negeri Amerika Serikat pada 23 Juli 2018 kembali mengeluarkan *advisory* untuk menyoroti taktik penghindaran sanksi yang digunakan oleh Korea Utara, yang dapat mengekspos bisnis-termasuk produsen, pembeli, dan penyedia layanan terhadap kepatuhan sanksi dibawah otoritas sanksi Amerika Serikat maupun PBB. *Advisory* tersebut juga membantu bisnis dalam mematuhi persyaratan di bawah

---

North Korea", *Federal Register Vol. 82 No. 184 Title 3-The President*, (September 2017).

*Title III, The Korean Interdiction and Modernization of Sanctions Act of the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).*

## **KESIMPULAN**

Kebijakan luar negeri merupakan bahasan tentang bagaimana negara-negara merespon terhadap semua kendala dan kesempatan yang diciptakan oleh lingkungannya, dengan berpijak pada penilaian akan kapabilitas yang dimilikinya. Persepektif konstruktivisme terkait dengan intersubjektivisme selaras dengan pemahaman Amerika Serikat terhadap identitas dan kepentingan nasionalnya dan menjadi dasar bagi Amerika Serikat dalam bertindak.

Kebijakan luar negeri *America First* memuat kumpulan komitmen yang memaparkan kepentingan-kepentingan nasional yang ingin diperjuangkan dan sebagai panduan dalam berbagai kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut menempatkan kepentingan dan keamanan nasional Amerika Serikat sebagai yang pertama dan utama. bersandar pada kebijakan luar negeri *America First*, Amerika Serikat mengambil tindakan atau Kebijakan *strategic accountability* dalam menanggapi program nuklir Korea Utara.

Kebijakan *strategic accountability*, dijalankan melalui *Maximum Pressure Campaign* atau kampanye penekanan maksimum, penekanan tersebut melalui forum internasional untuk mendapat dukungan internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah yang dijalankan yaitu bersandar atas kesadaran Amerika Serikat akan posisi dan peran dominan dalam perpolitikan internasional, sehingga Amerika Serikat memprakarsai dan mendorong dikeluarkannya sanksi multilateral yang

kuat terhadap Korea Utara melalui Dewan Keamanan PBB.

Untuk menyukseskan sanksi yang telah diterapkan tersebut, Amerika Serikat juga menekan Rusia dan Cina untuk menerapkan sanksi terhadap Korea Utara. Amerika Serikat juga mendorong negara-negara untuk memutuskan hubungan diplomatik, terutama hubungan dagang dengan Korea Utara, untuk meningkatkan isolasi terhadap sumber pendapatan Korea Utara yang digunakan untuk membiayai program nuklirnya.

Terakhir, langkah yang diambil Amerika Serikat yaitu menggunakan Otoritas peraturan nasional untuk mengeluarkan peraturan mengenai penerapan sanksi terhadap Korea Utara. Yaitu : *Title III : Countering America's Adversaries Through Sanction Act* (2 Agustus 2017), *Executive Order No. 13810* (20 September 2017), *North Korea Sanction Advisory: Sanction Risk Related to North Korea's Shipping Practices* (23 Februari 2018), dan *North Korea Sanction and Actions Advisory: Risk with Supply Chain Links to North Korea* (23 Juli 2018).

## **REFERENSI**

### **Jurnal dan Working Paper**

Alexander Wendt, "Anarchy is What States Make of it : The Social Construction of Power Politics." Dalam *International Organization* Vol. 46 No. 2 (1992) Cambridge University Press : 396-397.

Daniel Wertz, dkk, "Issue Brief : North Korea's Nuclear Weapons Program", *National Committee on North Korea*, (April 2018), <https://www.ncnk.org/resources/publications/DPRK-Nuclear-Weapons-Issue-Brief.pdf> (diakses 01 Oktober 2018)

Maysam Behraves, "Constructivism : An Introduction". *Lund University*. (Januari 2011), <http://www.e-ir.info/2011/02/03/constructivism-an-introduction/> (diakses 09 Oktober 2018)

### **Buku**

Aprilia Restuning Tunggal, *Ilmu Hubungan Internasional : Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Isu Global Kontemporer*, Cetakan 1. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013).

Cynthia Weber, *International Relations Theory : A Critical Introduction*, edisi kedua. (London dan New York : Routledge, 2005).

I Gede Wicaksana, "Konstruktivisme", *Teori Hubungan Internasional : Perspektif Klasik*, editor Vinsensio Dugis, (Surabaya : Cakra Studi Global Strategis (CSGS), 2016).

K.J Holsti, "International Politics : A framework for Analysis" *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis*, Penerjemah M. Tahir Azhary (Jakarta: Erlangga, 1988).

Mochtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Cetakan Revisi. (Jakarta : LP3ES, 1994).

Teuku May Rudy, *Teori Etika dan Kebijakan dalam Hubungan Internasional* (Bandung : Angkasa, 1993).

Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Cetakan 1. (Yogyakarta : CAPS Publishing, 2011).

### **Dokumentasi Resmi**

Dokumen "National Security Strategy of the United States of America", *White House*, (Desember 2017),

<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf> (diakses 31 Mei 2018).

Dokumen Executive Order 13810 "Imposing Additional Sanction with Respect to North Korea", *Federal Register Vol. 82 No. 184 Title 3-The President*, (September 2017).

Dokumen North Korea Sanction Advisory, "Sanction Risk Related to North Korea's Shipping Practices", (23 Februari 2018), [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Documents/dprk\\_vessel\\_advisory\\_02232018.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Documents/dprk_vessel_advisory_02232018.pdf) (diakses 26 Oktober 2018)

Dokumen Resolution 2407 (2018), *United Nations Security Council*, (21 Maret 2018), <http://unscr.com/en/resolutions/doc/2407> (diakses pada 26 oktober 2018)

Dokumen Security Council S.PV/8118, "8118<sup>th</sup> meeting", *United Nations*, (29 November 2017), <https://undocs.org/en/S/PV.8118> (diakses pada 5 Maret 2019).

Dokumen Security Council S/PV.8137, "8137<sup>th</sup> Meeting", *United Nations*, (15 Desember 2017), <https://undocs.org/en/S/PV.8137> (diakses pada 28 Oktober 2018).

Dokumen Security Council S/PV.8353, "8353<sup>th</sup> meeting", *United Nations*, (17 September 2018), <https://undocs.org/en/S/PV.8353> (diakses pada 6 Maret 2019)

Dokumen Security Council, "8210<sup>th</sup> meeting", New York, *United Nations*, (21 Maret 2018), <https://undocs.org/en/S/PV.8210> (diakses 6 Maret 2019)

Dokumen Security Council, S/PV.8042, “8042<sup>nd</sup> Meeting”, *United Nations*, (11 September 2017), <https://undocs.org/en/S/PV.8042> (diakses pada 6 Maret 2019).

Dokumen Security Council S/PV.8363, “8363<sup>th</sup> Meeting”, *United Nations*, (27 September 2018), <https://undocs.org/en/S/PV.8363> (diakses pada 8 Maret 2019)

Official Statement of The Government of The DPR of Korea “Withdraw of the Nuclear Non Proliferation Treaty”. 10 (Januari 2003), <http://www.korea-dpr.info/lib/203.pdf> (diakses 29 September 2018).

US Defense Intelligence Agency, “Global Nuclear Landscape 2018”, *Defense Intelligence Agency*, (Februari 2018).

### **Publikasi Resmi**

“Fact Sheet : Resolution 2371 (2017) Strengthening Sanction on North Korea”, *United States Missions to the United States*, <https://usun.state.gov/remarks/7924> (5 August, 2017), (diakses pada 5 Maret 2019).

Arms Control, “Fact sheet and Brief : Arms Control and Proliferation Profile : North Korea”. (June, 2018), <https://www.armscontrol.org/factsheets/northkoreaprofile> (Diakses pada 26 Januari 2018).

Mattis dan Tillerson (Secretary of Defense dan Secretary of State) “We are Holding Pyongyang to Account”. *White House*. 14 Agustus 2017. Di akses melalui <http://www.whitehouse.gov/briefings-statements/mattis-tillerson-holding-pyongyang-account/> pada 27 September 2018.

Nuclear Threat Initiative, “North Korea Nuclear Technology & Nuclear Weapons Program.” (2018). <https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear/> (diakses 16 Februari 2019)

Rex W. Tillerson, “Remarks at UN Security Ministerial Meeting on DPRK”, *Department of State*, (15 Desember 2017), <https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/201712/276627.htm> (diakses pada 28 Oktober 2018).

White House, “Remarks Of President Donald J. Trump – As Prepared For Delivery Inaugural Address” *The Inaugural Address*, 20 (Januari 2017) <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/> (diakses pada 14 Januari 2018).